

Perkembangan Pendidikan Kolonial di *Gemeente* Probolinggo Tahun 1918-1942

Tiyo Eka Mayshurah

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email:ekamayshurah@gmail.com

Sri Mastuti Purwaningsih

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email:srilmastuti@unesa.co.id

Abstrak

Pendidikan dan masyarakat, keduanya saling berkaitan satu sama lain, dan dengan berkembangnya pendidikan dapat mempengaruhi dinamisme kehidupan masyarakat. *Gemeente* Probolinggo ikut serta dalam penerapan Politik Etis serta mendirikan sekolah-sekolah tingkat dasar dan lanjut, bergaya barat yang disebut sebagai pendidikan kolonial guna mencapai tujuan yang diinginkan Pemerintahan Hindia-Belanda untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik dengan harga yang murah. Di balik semua tujuan yang diharapkan pemerintahan Hindia-Belanda, dalam kondisi empirisnya, tujuan tersebut memunculkan substansi lain dalam masyarakat *Gemeente* Probolinggo yaitu pendidikan menciptakan adanya mobilitas sosial masyarakat *Gemeente* Probolinggo.

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah bagaimana perkembangan dan peta pendidikan kolonial yang ada di *Gemeente* Probolinggo periode tahun 1918-1942, dan keterkaitan mengenai pengadaan pendidikan kolonial oleh pemerintahan Hindia-Belanda terhadap mobilitas sosial masyarakat di *Gemeente* Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian sejarah dengan empat tahapannya, yakni heuristik dimana peneliti mengumpulkan sumber yang didapatkan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Timur, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Probolinggo, Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, dan lain-lain. Tahapan yang kedua yaitu kritik sumber dengan melakukan uji dan verifikasi sumber-sumber yang telah didapatkan. Tahap ketiga ialah interpretasi, menafsirkan data yang telah diperoleh dan diverifikasi. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penulisan hasil dari penelitian sejarah yang dilakukan secara kronologis dan analitis.

Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di *Gemeente* Probolinggo mengalami peningkatan berdasarkan statistik jumlah peserta didik di fasilitas-fasilitas pendidikan kolonial yang disediakan yakni terhitung mengalami peningkatan hingga mencapai 16% atau sekitar 18.335 peserta didik di seluruh sekolah tingkat dasar baik pribumi maupun barat di tahun 1932 dibandingkan dengan populasi peserta didik di tahun 1930 dengan jumlah 13.864 peserta didik, dan dengan peningkatan tersebut maka terdapat kemungkinan bahwa di *Gemeente* Probolinggo mengalami mobilitas sosial melalui media berupa pendidikan. Mobilitas sosial masyarakat secara vertikal kategori mobilitas sosial sponsor (teori Turner) yang mana sebutan priyayi atau bangsawan tidak hanya didapatkan berdasarkan garis keturunannya saja melainkan berubah berdasarkan pada lulusan pendidikan seseorang serta pekerjaan atau jabatan yang dimilikinya. Perkembangan pendidikan ini dimanfaatkan masyarakat pribumi yang strata sosialnya menengah ke bawah untuk dapat menempuh pendidikan, menjadi lulusan terdidik, kemudian dapat menjabat di lingkungan pemerintah Hindia-Belanda atau bekerja dan menjabat di perusahaan-perusahaan swasta. Dengan begitu, pengadaan pendidikan kolonial telah melahirkan golongan masyarakat baru di *Gemeente* Probolinggo yang disebut dengan priyayi baru.

Kata Kunci: Pendidikan Kolonial, *Gemeente* Probolinggo, Mobilitas Sosial.

Abstract

Education and society, both are related to each other, and alongside the development of educations can affect the dynamism of society life. In Ethical Politics programme, Gemeente Probolinggo take part as for building western elementary and advance schools for colonial education purpose that the Government of Hollands-Indie want so they could get educated labor at low prices. Behind all the purposes that the Government of Hollands-Indie hoped for, in its empirical condition, those purposes bring up another substance in Gemeente Probolinggo society and that is the education has created a social mobility in Gemeente Probolinggo society.

The formulation of the problem which is the basis of research in this study is about how the development of colonial

education and the education mapping in Gemeente Probolinggo at 1918-1942, and about the relation between social mobility of Gemeente Probolinggo society and colonial educations that the government of Hollands-Indie held. This study used a historical research's methods that consisting four phases, first process is heuristic, is the collection of sources obtained from the East Java Regional Library and Archive Service, the Probolinggo Library and Archives Service, the University of state Surabaya Library, etc. The second process is the criticism of the source of the test and verification of sources acquired. The third process is interpretation, as for interpreting the data that has been obtained and has been verified. The last process is historiography, which is writing the results of historical research in chronological and analytical order.

The result obtained indicate that the development of education in Gemeente Probolinggo has increased based on statistics on the number of students in the colonial education facilities that had been provided, accounting for an increase of up to 16% or about 18.335 students in all primary schools both indogeneous and western schools in 1932 compared to the student population in 1930 with a total of 13.864 students, and by the increase in the number, there is possibility that in Gemeente Probolinggo there is social mobility through education as the medium. In this case the category is sponsor social mobility in vertical social mobility of society type (Turner theory), which the title of nobility is not only obtained based on lineage, but also changed based on education graduates or jobs owned also their position in their job. The development on education is used by people with middle to lower social strata to be able to take education, become educated graduates, then could serve in government circles or work and has position in private companies. Therefore, the provision of colonial education has given birth to a new group of people in Gemeente Probolinggo whose called the new priyayi.

Keywords: Colonial Education, Gemeente Probolinggo, Social Mobility.



1. PENDAHULUAN

Kemunculan Politik Etis disertai keputusan desentralisasi dengan memberikan otonomi kepada kota-kota terpusat di Jawa memberikan pengaruh terhadap perkembangan masyarakat. Salah satu kota yang merasakan pengaruh dari kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda adalah Probolinggo. Sebagai kota yang mendapatkan otonomi dari pemerintahan pusat melalui dikeluarkannya undang-undang desentralisasi (*Desentrasatie-wetgeving 1903*) oleh pemerintahan Hindia-Belanda di tahun 1903, Probolinggo telah dinobatkan sebagai *Gemeente* yang setara dengan Kotamadya, namun barulah pada tahun 1918 *Gemeente* Probolinggo memiliki *Gemeente Raad* berartikan “Dewan Kotamadya”, terbentuknya “*Gemeente Probolinggo*” (Kota Probolinggo) oleh pemerintahan Hindia Belanda secara riil berdasarkan Stbl 322-1918 pada tanggal 1 Juli 1918.¹

Sebagai salah satu kota penting di Jawa Timur, *Gemeente Probolinggo* memiliki sektor perdagangan, perkebunan, pertanian dan perindustrian, serta pusat pemerintahan didalamnya. Dengan adanya pusat pemerintahan, maka terdapat pula aktivitas-aktivitas kepegawaian dan aktivitas politik dalam proses mengatur *Gemeente Probolinggo*. Kepentingan pihak pemerintahan Hindia Belanda dalam faktor pusat pemerintahan menyebabkan pemerintah memerlukan tenaga-tenaga kerja yang mahir dalam mengatur sistem pemerintahan Hindia Belanda di kota-kota jajahannya terutama di kota-kota penting seperti *Gemeente Probolinggo*. Untuk memenuhi kepentingan tersebut, pemerintahan Hindia Belanda menetapkan kebijakan untuk menyediakan fasilitas pendidikan bergaya barat di kota-kota penting di Hindia Belanda.

Meskipun dengan adanya Politik Etis memberi harapan baru untuk kondisi masyarakat pribumi namun dalam pola penerapannya, lebih memberi dampak keuntungan kepada pemerintahan Hindia Belanda daripada masyarakat pribumi, contohnya dalam penyediaan fasilitas pendidikan bagi masyarakat pribumi, yang dimaksudkan untuk mendapatkan tenaga kerja rendahan di pemerintahan dan perkebunan agar dapat menakan biaya pengeluaran pemerintahan. Hal ini cenderung menggambarkan bahwa kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda tersebut termasuk dalam kategori kebijakan konstituen.

Adanya lajur pendidikan untuk masyarakat pribumi pada masa penerapan Politik Etis melahirkan suatu perkembangan khusus di bidang pendidikan ini. Menurut pendapat Kasiram (1983:23) perkembangan memiliki makna

sebagai suatu proses yang memunculkan sifat-sifat yang baru, yang mana berbeda dari sifat-sifat yang sebelumnya.² Perkembangan yang dialami oleh dunia pendidikan di Hindia-Belanda perlahan telah membuka kesempatan dan peluang baru kepada masyarakat Hindia-Belanda khususnya dari golongan orang-orang pribumi yang mulanya sangat dibatasi sebelum adanya penerapan Politik Etis.

Dapat dilihat ciri umum politik pendidikan oleh pemerintahan Hindia Belanda yang didominasi oleh orang-orang dengan golongan yang memiliki kekuasaan dan mengesampingkan nilai-nilai etis untuk mengembangkan sumber daya manusia secara menyeluruh. Dari hal ini, dapat disimpulkan ciri politik dan praktik pendidikan pemerintahan Hindia-Belanda pada saat Pra-Politik Etis yakni adanya gradualisme yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia, dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan Pribumi, kontrol sentral yang kuat, keterbatasan tujuan sekolah pribumi, dan peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai faktor penting dalam perkembangan pendidikan, prinsip konkordansi yang menyebabkan sekolah di Indonesia sama dengan di negeri Belanda, dan tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis untuk pendidikan anak pribumi.³

Dengan begitu, dari gambaran tersebut dapat dinyatakan bahwasannya pendidikan kolonial merupakan pendidikan yang memang sengaja ditujukan kepada kualitas dan integritas, hal ini didasari dengan keinginan bangsa Belanda sebagai pihak kolonisator agar proses kolonialisme teritorial mereka di Hindia Belanda dapat menghasilkan keuntungan yang besar tanpa adanya kepentingan dan maksud untuk menerapkan *nation-building* terhadap masyarakat di wilayah koloninya.⁴

Dari tujuan utama pengadaan sekolah-sekolah untuk mendapatkan calon-calon tenaga yang dapat dipergunakan dalam membantu dan menguatkan kedudukan pemerintahan Hindia Belanda tersebut kenyataannya malah menciptakan adanya kalangan atau golongan masyarakat baru yang disebut dengan priyayi rendahan dimana anak-anak dari penduduk pribumi yang tidak memiliki garis keturunan dari kalangan bangsawan atau priyayi dapat mengisi posisi-posisi dalam administrasi pemerintahan maupun profesi atau jabatan elit lainnya melalui pendidikan.⁵

Guna mengkaji pembahasan mobilitas sosial yang muncul dalam masyarakat pasca diadakannya pendidikan kolonial, membutuhkan teori yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan penelitian ini. Dalam kajian penelitian ini, mobilitas sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan

¹ Pemkot Probolinggo. 2010. *Sejarah Kota Probolinggo dari Waktu ke Waktu*. Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo. Hal: 15-16

² Wahyuni, Nani. *Definisi Perkembangan*. 25 Oktober 2010 11:42, diakses pada tanggal : 12 Januari 2021, pukul : 11.15 WIB. (www.kompasiana.com).

³ S, Nasution. 1994. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Edisi Ke-2 Cetakan 1. Jakarta : Bumi Aksara. Hal: 20

⁴ Santoso, Slamet Iman. 1987. *Pendidikan di Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta. Haji Masagung. Hal:200

⁵ van Niel, Robert. 1984. *Munculnya Elit Modern Indonesia : Terjemahan Yayasan Ilmu Sosial, Jakarta*. Jakarta. Dunia Pustaka Jaya. Hal: 45-46.

mobilitas sosial vertikal. Kebijakan pemerintahan Hindia-Belanda mengenai pendidikan di *Gemeente* Probolinggo mendukung terjadinya mobilitas sosial secara vertikal dalam lingkup masyarakat pada masa itu. Menurut Turner, terdapat dua jenis mobilitas vertikal yakni mobilitas sponsor dan mobilitas konteks, dimana mobilitas konteks didefinisikan sebagai sistem dimana status elit menjadi hadiah atau imbalan yang didapatkan seseorang melalui usaha dalam persaingan terbuka, sedangkan mobilitas sponsor, penentuan status elit berdasarkan kriteria dan kualifikasi tertentu dan tidak dapat diganggu gugat oleh usaha apapun.⁶

2. METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian sejarah, perlu adanya aturan atau prosedur kerja penelitian sejarah sebagai artian dari metode sejarah. Langkah-langkah dalam metode sejarah dibagi menjadi empat, yaitu: (1) Heuristik, (2) Kritik sumber, (3) Interpretasi, (4) Historiografi.⁷ Tahapan prosedur dalam metode penelitian yang pertama yaitu heuristik. tahap awal, heuristik sebagai proses mengumpulkan sumber sejarah dan data-data relevan serta mendukung penulisan penelitian sejarah ini. Sumber dan data yang dimaksud berupa buku-buku yang berkaitan dengan sejarah pendidikan masa kolonial di Indonesia khususnya Jawa Timur dan Probolinggo, jurnal maupun artikel yang mendukung, dan arsip laporan data statistik pendidikan di Jawa Timur pada masa kolonial Belanda di Indonesia.

Langkah selanjutnya memasuki tahap kritik sumber atau verifikasi sumber sejarah. Dalam keilmuan sejarah, kritik sumber berartikan proses mendapatkan kredibilitas suatu sumber sejarah dan keotentikannya sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan saat menggali makna dari sumber tersebut secara lebih detail dan mendalam. Dalam tahapan kritik sumber ini, semua proses dilakukan secara runtut. Buku dan catatan dari koleksi Arsip Kota Probolinggo dipilah berdasarkan tahun penulisan dan siapa penulisnya sehingga dapat terkumpul buku-buku serta catatan yang isinya dapat dikategorikan dalam sumber sekunder dan isinya dapat dijadikan pendukung sumber primer berupa laporan pendidikan (*Algemeene Verslag van het Onderwijs in Nederlands Indie*). Kemudian beralih pada tahap interpretasi, yang mana peneliti dituntut untuk dapat mengurai dan menyatukan fakta-fakta yang didapatkan dari sumber sejarah agar dapat menghubungkan dan menyusun gambaran peristiwa dan harus didasari oleh fakta-fakta sejarah. Pada penelitian ini, digunakan interpretasi secara analisis dan juga sintesis. Peneliti menggunakan teori sebagai alat sintesa dan analisa terhadap fakta-fakta yang didapatkan setelah proses kritik sejarah. Penggunaan teori sebagai alat sintesa didukung dengan konsep dalam penulisan sejarah yang dapat didukung dengan adanya pendekatan ilmu-ilmu sosial yang memungkinkan untuk mempermudah memahami makna-makna dalam peristiwa

sejarah. Setelah melalui tahap heuristik, verifikasi (kritik sumber), dan interpretasi, maka langkah yang terakhir ialah menuliskan fakta-fakta sejarah yang telah didapat dan merangkainya dalam bentuk tulisan yang menggambarkan peristiwa berdasarkan data-data yang telah didapatkan dimana dalam penelitian ini guna membahas mengenai perkembangan fasilitas dan peta pendidikan yang ada selama pemerintahan Hindia Belanda di Probolinggo selama jabatannya sebagai kota *Gemeente*, serta keterkaitan yang mana diawali dengan adanya pengadaan fasilitas pendidikan kolonial di *Gemeente* Probolinggo terhadap mobilitas sosial masyarakatnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keinginan pemerintah untuk mendapatkan tenaga-tenaga kerja dengan gaji murah menjadi hal yang lumrah di masa kolonial. Untuk mencapai tujuan tersebut, pastinya memerlukan adanya fasilitas pendidikan guna mempersiapkan anak-anak khususnya dari kalangan Pribumi (kalangan yang digolongkan sebagai tenaga kerja yang jauh lebih murah) yang mana mayoritas penduduk berada agar mendapatkan pendidikan dan setelah lulus dapat terjun di bidang-bidang tertentu dan mengisi posisi-posisi penting baik di lingkungan administrasi pemerintah maupun di perusahaan-perusahaan swasta. Oleh sebab itu dibangunlah sekolah-sekolah bergaya barat di kota-kota penting di Hindia-Belanda guna memenuhi tujuan tersebut. Probolinggo menjadi salah satu kota di Jawa Timur yang mendapat perhatian dari pemerintahan Hindia-Belanda dengan dibangunnya pendidikan untuk masyarakat yang tinggal selingkup wilayah Probolinggo pada saat itu. Yang menjadi alasan utama yakni dibutuhkannya tenaga-tenaga kerja untuk memenuhi kepentingan administrasi di lingkungan pemerintahan di *Gemeente* Probolinggo pada saat itu. Terlebih dengan adanya perubahan status Probolinggo menjadi *Gemeente* pada tahun 1918 dengan begitu, Probolinggo tidak lagi berada dibawah administrasi Keresidenan Pasuruan lagi yang pastinya membutuhkan tenaga kerja administratif sendiri. Dari hal tersebut, mulai adanya peningkatan pada bidang pendidikan di *Gemeente* Probolinggo guna mendapatkan tenaga kerja yang sesuai bidangnya.

A. Perkembangan dan Peta Pendidikan Kolonial di *Gemeente* Probolinggo

Pendidikan yang disediakan di *Gemeente* Probolinggo pada awal abad 19 terdapat sekolah raja (*Hoofdenschool*) dan juga terdapat sekolah guru (*Kweekschool*), hal ini tidak membuat *Gemeente* Probolinggo mendirikan setiap tipe sekolah untuk memenuhi pendidikan penduduknya. Selama berstatus sebagai *Gemeente*, Probolinggo tercatat hanya menyediakan fasilitas sekolah tingkat dasar dan lanjut. Berdasarkan pada

⁶ _____, *Teori Tentang Mobilitas Sosial*. Hal: 2, diunduh : 6 April 2020, pukul : 08.00 WIB. (www.ppg.spada.ristekdikti.go.id).

⁷ Kasdi, Aminuddin. 2011. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press. Hal: 10-11

data statistik dari laporan umum tentang pendidikan di Hindia-Belanda tahun 1929/1930 (*Algemeene Verslag Tweede Deel: Statistische Gegevens*), Probolinggo memiliki HCS, ELS, *Volkschool*, *Vervolgschool*, *Voll. 2e kl. School*, *Schakelschool*, HIS dan sekolah khusus sederajat.

Berikut data distribusi regional populasi sekolah:

Tabel 1: Data Distribusi Regional Populasi Sekolah Dasar Per-Jenis Sekolah

| Jenis Sekolah | Jongen (Laki-laki) | Meisje (Perempuan) |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Volkschool | 7050 | 546 |
| Vervolgschool | 285 | 57 |
| Voll. 2e kl. School | 4067 | 317 |
| E.L.S. | 262 | 238 |
| H.C.S | 161 | 83 |
| H.I.S. en Speciale School | 488 | 240 |
| Schakel School | 69 | 1 |
| Totaal. | 12.382 | 1.482 |
| Totaal Generaal | 13.864 | |

Sumber: *Algemeene Verslag van het Onderwijs in Nederlands Indie Over het Schooljaar 1929/ 1930 Tweede Deel: Statistische Gegevens*. Hal:38-39. Koleksi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur

Dari data tersebut menyebut bahwa *Gemeente* Probolinggo memiliki sekolah-sekolah tingkat dasar dan lanjut untuk mem-*provide* pendidikan kepada penduduknya. Terdapat *Europeesche Lagere School* atau disingkat ELS sebagai sekolah dasar yang hanya menampung anak-anak keturunan Belanda atau Eropa dimana sekolah ini menggunakan sistem pembelajaran bergaya Eropa dengan pengajar-pengajarnya menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Untuk bisa lulus dari sekolah ini perlu menempuh masa belajar selama 7 tahun. Tidak jauh berbeda dari ELS dengan masa belajar yang sama, jika di *Hollandsche Inlandsche School* atau HIS dan *Hollandsche Chineesesche School* atau HCS yang membedakan dari ELS adalah siswa-siswinya yang mana anak-anak pribumi dari kalangan bangsawan, pegawai pemerintah, dan tokoh-tokoh terpandang, lebih mayoritas di HIS daripada di ELS begitupula dengan anak-anak keturunan Tiongkok yang lebih mayoritas di HCS daripada di ELS.

Jika tiga sekolah tersebut menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran, berbeda dengan *Schakelschool*, *Vervolgschool*, dan *Volkschool*. Di sekolah-sekolah ini menggunakan bahasa daerah sebagai sarana linguistik proses pembelajaran, namun dari ketiganya memiliki masa belajar yang berbeda-beda walaupun tingkat akademis yang terbilang sama sebagai sekolah dasar. *Schakelschool* memiliki masa belajar selama 5 tahun, sekolah ini lebih familiar dengan sebutan sekolah

rakyat. Untuk *Volkschool* yang memiliki arti sekolah desa, masa belajarnya hanya 3 tahun, namun kemudian berlanjut ke tahap sekolah di *Vervolgschool* yang merupakan sekolah lanjutan dari *Volkschool*. Ketiganya sama-sama menampung anak-anak pribumi guna memberi pengajaran membaca, menulis, dan berhitung.

Kebijakan pemerintahan Hindia-Belanda pada awal 3,5 dasawarsa dalam bidang pendidikan tidak menampakkan kesediaannya untuk mengeluarkan banyak dana bagi pendidikan penduduk pribumi, melainkan lebih memberikan perhatian pada pendidikan anak-anak keturunan Belanda dan bangsa Eropa lainnya yang orangtuanya bekerja di Hindia-Belanda.⁸ Setelah adanya politik etis, perlahan-lahan pemerintahan Hindia-Belanda memberikan kesempatan lebih kepada penduduk pribumi dalam mendapatkan pendidikan meskipun masih terbatas. Oleh karena itulah tidak seluruh anak-anak pribumi pada saat itu mendapatkan hak pendidikan yang sama. Untuk menunjang pernyataan tersebut berikut data persentase anak yang bersekolah dibandingkan dengan populasi pada tahun 1930:

Tabel 2: Data Populasi Sekolah Dasar Regional Berdasarkan Dewan Negara

| Pendidikan Dasar Keseluruhan | Eropa | | Pribumi | | Vr. Oosterlingen (Timur Asing) | |
|--|-------|-------|---------|-------|--------------------------------|------|
| | J. | M. | J. | M. | J. | M. |
| | 189 | 193 | 11.964 | 1.170 | 229 | 119 |
| Persentase Populasi Negara Per-Dewan Negara* | 11,70 | 14,63 | 2,62 | 0,25 | 4,03 | 2,70 |

*) *Populasi Dewan Negara (County Council) berdasarkan publikasi sensus tahun 1930*

Ket: J= Jongen (Laki-laki), M= Meisje (Perempuan)

Sumber: *Algemeene Verslag van het Onderwijs in Nederlands Indie Over het Schooljaar 1929/1930 Tweede Deel : Statistische Gegevens*. Hal:50-51. Koleksi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur

Persentase anak-anak yang mendapatkan pendidikan dasar berdasarkan sensus tahun 1930 di *Gemeente* Probolinggo mencapai total persentase 35,93% dari seluruh populasi anak-anak yang ada. Masih terdapat 64,07% anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada saat itu.

Selama menjadi wilayah *Gemeente*, Probolinggo tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur sekolah saja, pemerintahan Hindia-Belanda juga turut membangun fasilitas yang dapat menunjang kehidupan sosial serta perekonomian penduduknya seperti rehabilitasi pasar, pembangunan jalan-jalan beraspal, dan melengkapi Probolinggo dengan listrik.⁹ Dengan didukung adanya

⁸ Supriadi, Dedi, (Ed) (2003) *Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*, Jakarta: Depdikbud. Hal:8., dalam Supardan, Dadang. 2008. "Menyingkap Perkembangan Pendidikan Sejak Masa Kolonial Hingga Sekarang : Perspektif Pendidikan Kritis". Dalam *Generasi Kampus*, Volume 1, Nomor

2, September 2008. Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Hal: 98.

⁹ Astutik, Ruli Muji. 2013. "Gemeente Probolinggo 1918-1926". Dalam AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 1, No.3 (Hal. 520-531). Surabaya : Universitas Negeri Surabaya. Hal:530.

perkembangan infrastruktur serta daerah yang subur, membuat Probolinggo makin diminati oleh masyarakat baik dari bangsa Eropa maupun Timur Asing untuk menetap di *Gemeente* Probolinggo sehingga menyebabkan adanya penambahan penduduk di wilayah ini pula.

Semakin lama, semakin banyak pula penambahan penduduk di *Gemeente* Probolinggo yang dilatari oleh perubahan wilayah dari tradisional ke modern. Fasilitas beserta infrastruktur yang semakin memadai menjadi suatu primadona tersendiri baik untuk bangsa Eropa maupun Timur Asing selain wilayahnya yang subur dan strategis. Tak ayal pula dengan populasi peserta didik di sekolah-sekolah dasar *Gemeente* Probolinggo yang ikut mengalami peningkatan seperti pada data berikut ini.

Tabel 3: Data Populasi Peserta Didik Sekolah Dasar Per-Propinsi Berdasarkan Sekolah Umum dan Sekolah Barat

| Residenties of afdeeling -en (Wilayah) | Absolute cijfers (Angka Mutlak) | | | | | |
|--|--|--------|---------|--|--------|--------|
| | Inlandsch onderwijs (Pendidikan Pribumi) | | | Westersch lager onderwijs (Pendidikan Dasar Barat) | | |
| | jongen | meisje | totaal | jongen | meisje | total |
| Afd. Madioen | 67.181 | 21.707 | 88.888 | 1.575 | 1.349 | 2.924 |
| „ Bodjonegoro | 49.878 | 11.234 | 61.112 | 972 | 549 | 1.521 |
| „ Soerabaja | 38.183 | 8.306 | 46.489 | 6.067 | 4.758 | 10.825 |
| „ Madoera | 18.580 | 2.840 | 21.420 | 853 | 390 | 1243 |
| „ Kediri | 92.556 | 33.653 | 126.209 | 2.660 | 1.570 | 4.230 |
| „ Malang | 33.364 | 6.763 | 40.127 | 3.592 | 2.626 | 6.218 |
| „ Probolinggo | 14.256 | 2.138 | 16.394 | 1.130 | 811 | 1.941 |
| „ Besoeki | 33.832 | 3.490 | 37.322 | 1.422 | 851 | 2.273 |
| Totaal O.Java | 347.830 | 90.131 | 437.961 | 18.271 | 12.904 | 31.175 |

Jongen : Laki-laki, Meisje : Perempuan

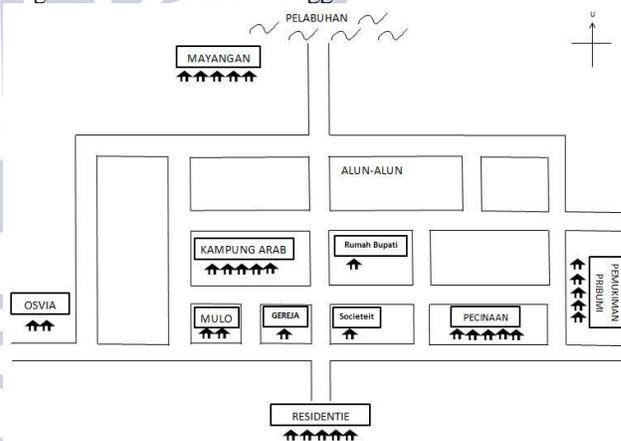
Sumber: *Algemeene Verslag van het Onderwijs in Nederlands Indie Over het Schooljaar 1931/1932 Tweede Deel : Statistische Gegevens* Halaman 32-33. Koleksi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur.

Dari ringkasan tabel tersebut menjelaskan mengenai populasi peserta didik baik dari bangsa Eropa maupun penduduk pribumi yang ada di Jawa Timur. Jika dibandingkan dengan populasi di tahun 1930, populasi dari peserta didik di Probolinggo terhitung mengalami peningkatan hingga mencapai 16% atau sekitar 18.335 peserta didik diseluruh sekolah tingkat dasar baik pribumi maupun barat.

Tidak hanya tersedianya sekolah-sekolah tingkat

dasar dan lanjut saja, Probolinggo juga dikenal dengan sebutan “Kota Perguruan”. Label ini ditujukan bukan karena tanpa sebab, melainkan sejak awal abad ke-19, pemerintahan kolonial Belanda telah mendirikan sekolah untuk menghasilkan tenaga kerja guru yang disebut *Kweekschool*. Selain itu, Sekolah pamong praja yang bernama OSVIA (*Opleidingschool Voor Inlandsche Ambtenaren*) juga didirikan untuk menghasilkan calon-calon pegawai Pamong Praja (*Ambtenaar*), dan sekolah guru bantu atau *Noormalschool*.¹⁰

Peta pendidikan di Probolinggo dilihat dari persebaran sekolahnya berpola cenderung tidak teratur. Sekolah-sekolah yang dibangun tidak terpusat di satu wilayah khusus untuk pendidikan melainkan tersebar di beberapa titik tanpa pola. Sekolah OSVIA dibangun disebelah barat kota, sedikit agak jauh dari pusat kota, tepatnya di sebelah utara jalan protokol atau jalan raya pos (sekarang Jl. Soekarno-Hatta) dimana hingga kini arsitektur bangunannya masih ada dan dialih-fungsikan sebagai pusat Batalyon Zipur Probolinggo Kota. Sekolah lain yang masih diketahui letak pasti dari bangunannya adalah Sekolah Lanjutan (MULO), berada di sebelah barat *Weduwestraat* (Sekarang Jl. Dr. Moch.Saleh) yang merupakan wilayah pemukiman penduduk bangsa Belanda dan Eropa dekat dengan pusat kota pemerintahan dan rumah residen, kini bangunannya telah dialih-fungsikan sebagai Sekolah Dasar Negeri Sukabumi 2 Probolinggo.



Gambar 1: Lokasi OSVIA dan MULO dalam Peta Probolinggo Simplifikasi

(Sumber: Dokumen peneliti berdasarkan peta Probolinggo tahun 1940)

Untuk tata letak dari sekolah-sekolah yang lainnya tidak diketahui secara pasti lokasi sesungguhnya dikarenakan minimnya informasi tertulis maupun sumber-sumber lain yang menjelaskan tentang pemetaan sekolah-sekolah lain sehingga mempersulit dalam menggambarkan posisi pendirian sekolah di peta ilustrasi simplifikasi dari peta kota Probolinggo tersebut.

Dari tata letak kedua bangunan sekolah tersebut cukup memberi pernyataan yang mana pada saat itu,

¹⁰ Pemkot Probolinggo. 1968. *Setengah Abad Usia Kotamadya Probolinggo.*, Hal:117.

pemerintahan Hindia-Belanda di Kota Probolinggo tidak terlalu memperhatikan kepentingan pendidikan sehingga tidak mengkhususkan daerah tertentu untuk program pendidikan kepada penduduknya.



Sekolah Lanjutan di Probolinggo (Sekarang SD Sukabumi 2)
(Repro Kantor Arsip - Sumber : Arsip Nasional RI)

Gambar 2: Sekolah Lanjutan (MULO) di Probolinggo
(Sumber: Koleksi Arsip Kota Probolinggo)

Selain dua sekolah tersebut, untuk pemetaan sekolah-sekolah lainnya tidak ditemukan sumber yang menjelaskan letak pasti dari sekolah-sekolah yang lain, hanya terdapat bukti primer berupa potret-potret bangunan sekolah yang diperoleh dari koleksi-koleksi Arsip Kota Probolinggo, seperti foto bangunan *Frobleschool*, dan HCS (Sekolah Cina).



Repro Kantor Arsip Sekolah Cina Tahun 1930-an Sumber : Dedy

Gambar 3: Sekolah Cina (HCS) di Probolinggo

(Sumber: Koleksi Arsip Kota Probolinggo)

Dan selama prosesnya, sekolah-sekolah tersebut telah dimanfaatkan oleh pemerintahan Hindia-Belanda dalam mendapatkan tenaga kerja administrasi dengan upah murah guna menekan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintahan akibat terkurasnya dana pemerintah untuk biaya perang, baik

perang di Jawa maupun perang yang dialami Belanda di Eropa.



Gambar 4: Potret Bangunan Sekolah OSVIA di Probolinggo

(Sumber : Koleksi Arsip Kota Probolinggo)

Sekolah-sekolah tersebut mengalami pasang-surutnya masing-masing. Dibangun pada tahun 1875 *Kweekschool* di Probolinggo kemudian dihapus pada tahun 1928. OSVIA juga mengalami hal serupa dimana sekolah yang menjadi kebanggaan Probolinggo ini ditiadakan pada tahun 1931, diikuti dengan sekolah *Noormalschool* yang juga dihapus di tahun berikutnya.¹¹



Gambar 5: Potret Bangunan Sekolah Frobleschool di Probolinggo

(Sumber : Koleksi Arsip Kota Probolinggo)

Habis gelap terbitlah terang, mungkin analogi ini juga bisa menggambarkan pendidikan di Probolinggo dengan didirikannya sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah salah satunya didirikannya MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*), sekolah tingkat menengah pertama yang walaupun di awal berdirinya masih dihadiri oleh anak-anak dari kalangan tertentu saja. Serta disebutkan dalam catatan *Setengah Abad Usia Kotamadya Probolinggo(1968); Kehidupan Pendidikan Pengajaran, Agama dan Kebudayaan* bahwa Probolinggo pernah memiliki sebuah Sekolah Guru Kristen (*Christelijke Kweekschool*).

¹¹ Pemkot Probolinggo. 1968., *Loc.Cit.*

B. Kehidupan Sosial Masyarakat dan Mobilitas Sosial Vertikal dalam Masyarakat *Gemeente Probolinggo*

Di sekolah kolonial yang didirikan, peserta didiknya berasal dari kalangan anak keturunan bangsa Eropa, anak keturunan bangsa Timur Asing, dan sebagian kecil dari anak-anak dari penduduk pribumi. Hanya sebagian kecil anak-anak penduduk pribumi yang dimaksud berasal dari keluarga kaum bangsawan, priyayi atau elit. Yang disebut sebagai kaum priyayi atau elit adalah kalangan masyarakat yang mempertahankan kesatuan dan kemurnian darah mereka dengan mengikuti suatu pembatasan yang keras agar dapat mempertahankan identitas sosial mereka dalam lingkungan strata sosial masyarakat, dimana kaum ini berjumlah kurang dari dua persen dari jumlah seluruh penduduk Hindia-Belanda.¹² Golongan masyarakat ini telah ada jauh sebelum para pedagang Belanda datang ke Nusantara. Di Jawa, kaum priyayi atau elit berasal dari keturunan raja, orang-orang yang bekerja di lingkungan kerajaan, tokoh-tokoh maupun para pedagang besar yang berpengaruh. Hingga memasuki tahun 1900an, ukuran utama untuk mengetahui posisi seorang priyayi dalam golongan sosial, dapat melalui fungsi sosial mereka. Jika dalam masyarakat Jawa, kaum ini menyatu dalam lingkungan masyarakat pada tingkat di atas lapisan masyarakat umum dan menimbulkan lapisan intelektual, budaya, dan kosmologis dalam lingkup masyarakat.¹³ Di Probolinggo, lapisan masyarakat terdiri dari 4 tingkatan. Penduduk yang berada pada tingkatan pertama adalah penduduk bangsa Eropa, yang kedua adalah penduduk Timur Asing, kemudian penduduk pribumi dari golongan kaum priyayi dan bangsawan, dan yang tingkatan paling bawah ialah penduduk umum yang mayoritas okupasinya ialah sebagai petani, nelayan, dan buruh.

Tidak semua sekolah-sekolah tingkat dasar yang diperuntukkan kepada anak-anak kalangan pribumi yang benar-benar dapat diisi oleh peserta didik dari semua kalangan pribumi, hanya golongan-golongan dari strata sosial tertentu yang mendapat kesempatan untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang dimaksudkan. Sekolah-sekolah tingkat dasar di *Gemeente Probolinggo* berdasarkan strata sosial peserta didiknya sebagai berikut;

1. *Europeesche Lagere School* (ELS)

Sekolah bergaya barat dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda ini memiliki masa pendidikan hingga tujuh tahun. Sekolah ini mayoritas diperuntukkan kepada anak-anak dari kalangan keturunan Eropa, bangsawan Timur Asing, dan anak-anak dari tokoh terkemuka dan bangsawan pribumi. Sekolah dasar ini mengajarkan kepada peserta didiknya untuk membaca, menulis, dan berhitung. Peserta didik *Europeesche Lagere School* (ELS) yang terdapat di Probolinggo mencapai 500 peserta didik di tahun 1929/1930 dengan rincian 262 peserta didik laki-laki dan 238 peserta

didik perempuan.

2. *Hollandsche Inlandsche School* (HIS)

Hollandsche Inlandsche School (HIS) dengan tujuh tahun masa pendidikan yang harus ditempuh oleh peserta didik yang berasal dari orang-orang pribumi golongan bangsawan, pegawai, pedagang besar, dan tokoh-tokoh penting yang mana golongan-golongan tersebut masuk dalam strata sosial tingkat atas di kalangan orang-orang pribumi, dengan bahasa pengantar yang digunakan di sekolah ini menggunakan bahasa Belanda serta gaya pembelajaran *westernch* (barat). Jumlah peserta didik yang bersekolah di HIS yang terdapat di *Gemeente Probolinggo* tercatat pada tahun 1929/1930 hingga 728 peserta didik, dengan rincian 488 peserta didik laki-laki dan 240 peserta didik perempuan. Sekolah ini menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar pembelajarannya.

Dikarenakan tidak semua anak dari kalangan pribumi yang dapat bersekolah di *Hollandsche Inlandsche School* (HIS), terdapat empat dasar penilaian agar calon peserta didik dapat masuk ke sekolah ini diantaranya, keturunan dari golongan priyayi, jabatan pegawai pemerintahan yang dimiliki orangtua, kekayaan, dan pendidikan yang pernah ditempuh oleh orangtua mereka. Selain itu, ada pula kategori-kategori yang menjadi kalangan masyarakat prioritas dalam seleksi calon peserta didik dimana terdapat 3 kategori guna dapat membedakan berdasarkan golongan sosial masyarakat yakni terdapat kategori A yakni dari kalangan bangsawan, pejabat, dan pekerja dengan gaji bersih lebih dari 75 gulden dan kategori B dimana orangtuanya minimal merupakan lulusan dari MULO atau dari *Kweekschool*, kedua kategori tersebut yang dianggap merupakan kalangan atas sebagai kalangan prioritas utama, sedangkan kategori C yang termasuk didalamnya adalah orang pribumi kalangan pegawai tingkat rendah, militer, pengusaha/pedagang kecil, orangtua mereka yang pernah menempuh pendidikan di *Hollandsche Inlandsche School* (HIS), serta kalangan petani dan nelayan, kalangan masyarakat tersebut dianggap sebagai kalangan menengah ke bawah dalam strata sosial masyarakat.¹⁴ Bagi orang-orang pribumi, sekolah HIS ini menjadi jalan utama untuk berkesempatan meningkatkan strata sosial mereka dimana awalnya pengadaan sekolah ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang dari kalangan elit saja namun setelah adanya penerapan Politik Etis, anak-anak dari strata sosial yang lebih rendah juga dapat bersekolah di sekolah ini.¹⁵

3. *Hollandsche Chinessesche School* (HCS)

Sekolah dengan tingkatan, masa dan gaya pembelajaran yang sama juga terdapat pada *Hollandsche Chinessesche School* (HCS), faktor pembedanya dengan sekolah HIS ialah peserta didiknya yang berasal dari kalangan penduduk dari keturunan Timur Asing serta bahasa

¹² van Niel, Robert. 1984., *Op.Cit.*, Hal:40.

¹³ van Niel, Robert. 1984., *Loc.Cit.*

¹⁴ Prayudi, Gusti Muhammad dan Dewi Salindri. 2015. *Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Surabaya Tahun*

1901-1942. Dalam *Publika Budaya* Volume 1, No.3 Maret 2015 (Hal. 20-34). Jember : Universitas Jember. Hal:25.

¹⁵ *Nasution*. 1983. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung. Bumi Aksara. Hal:115, dalam Prayudi, Gusti Muhammad dan Dewi Salindri. 2015.*Ibid.*

pengantar yang digunakan ialah bahasa nasional Tiongkok (Bahasa Kuo Yu). Terdapat 161 peserta didik laki-laki dan 83 peserta didik perempuan yang bersekolah di HCS yang ada di Probolinggo, jumlah total peserta didik mencapai 244 peserta didik.

4. *Schakelschool* (Sekolah Rakyat)

Sekolah dengan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar serta masa pendidikan yang mencapai 5 tahun ini merupakan sekolah peralihan dari *volkschool* (Sekolah Desa) yang mayoritas peserta didiknya berasal dari anak-anak pribumi kalangan menengah ke bawah. Di *Gemeente* Probolinggo hanya terdapat 69 peserta didik laki-laki dan 1 peserta didik perempuan saja, total keseluruhan hanya 70 peserta didik, tercatat pada angka tahun 1929/1930.

5. *Volkschool* (Sekolah Desa)

Pengadaan *Volkschool* sebenarnya ditujukan untuk misi pemberantasan buta huruf di desa-desa. Masa pendidikannya juga tidak terlalu lama, yakni 3 tahun. Penggunaan bahasa pengantar tidak menggunakan bahasa Belanda melainkan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar dan pembelajaran dasar yang diajarkan seperti membaca, menulis, dan berhitung. 7050 peserta didik laki-laki dan 546 peserta didik perempuan berkesempatan menempuh pendidikan di sekolah ini, tercatat dalam laporan tahun 1929/1930. Terdapat 7596 peserta didik yang bersekolah di *Volkschool* yang diadakan di Probolinggo dengan begitu, angka ini merupakan angka jumlah peserta didik yang paling banyak dibandingkan dengan angka jumlah peserta didik dari sekolah-sekolah kolonial Belanda yang diadakan di *Gemeente* Probolinggo berdasarkan catatan laporan pendidikan tahun 1929/1930.

6. *Vervolgschool* (Sekolah Lanjutan)

Pengadaan sekolah *Vervolgschool* ialah sebagai sekolah lanjutan dari sekolah *Volkschool* dengan masa pendidikan 2 tahun. Penggunaan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar serta kurikulum pendidikan yang sederhana yang sama dengan Sekolah Desa seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta belajar membuat kerajinan bagi peserta didik perempuan. Tidak terlalu banyak peserta didik yang berminat dan berlanjut menempuh pendidikan di sekolah ini. Di Probolinggo sendiri hanya 342 peserta didik yang berlanjut menempuh pendidikan di *Vervolgschool*, 285 peserta didik laki-laki dan 57 peserta didik perempuan.

7. *Voll. 2e kl. School* (Sekolah Ongko Loro)

Sekolah ini merupakan sekolah pendidikan rendah yang menggunakan bahasa daerah kemudian berganti menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar dengan lama masa pendidikan 3 tahun sebelum akhirnya di tahun 1910 masa pendidikannya ditambah menjadi 5 tahun. Meskipun sama dengan *Volkschool*, *Schakelschool*, dan *Vervolgschool* yang mana kurikulum yang diajarkan yang

mana cukup sederhana, menulis, membaca, dan berhitung, akan tetapi anak-anak yang bersekolah di Sekolah Ongko Loro difokuskan agar mempersiapkan tenaga-tenaga kerja pegawai tingkat rendah untuk pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta.¹⁶ Jumlah peserta didik di Probolinggo yang bersekolah di sini mencapai 4384 peserta didik, dengan 4067 peserta didik laki-laki dan 317 peserta didik perempuan.

Penerapan kebijakan Politik Etis di Hindia-Belanda sebagai langkah pemerintahan Belanda guna memperbaiki perekonomian di Hindia-Belanda dan sebagai bentuk realisasi balas budi yang mana dicetuskan oleh van Deventer, menghasilkan kondisi keuangan yang agak membaik di tahun 1904. Pada masa ini, penduduk mendapatkan kesempatan untuk mengalami transisi dari masyarakat agraris menuju ke masyarakat industri tanpa menghapus masyarakat agraris itu sendiri, serta menjadi akar perubahan kota Probolinggo dari kota tradisional menjadi kota modern. Transisi ini dilatari dengan pembenahan struktur tata kota, perekonomian masyarakat dan pendidikannya. Ranah pendidikan di Probolinggo, selama masa pemerintahan Hindia-Belanda, tidak banyak dibahas maupun tercatat secara detil. Meskipun demikian, hasil yang diberikan dengan adanya pendidikan bagi penduduk di Probolinggo, dapat dikatakan cukup terasa.

Jika di masa sebelum adanya politik etis pendidikan di Hindia-Belanda dibedakan menjadi 2 kelas, *De Schoolen der Eerste Klasse* khusus untuk anak-anak keturunan bangsawan dan priyayi, dan *De Schoolen der Tweede Klasse* yang diperuntukkan kepada anak-anak pribumi dengan masa sekolah hanya 3 tahun, lebih cepat dari sekolah untuk bangsawan yang masa belajarnya 5 tahun.¹⁷ Diskriminasi ini terjadi pula dengan pendidikan pasca politik etis dimana membedakan pendidikan berdasarkan kelas sosial peserta didiknya, sekolah untuk orang-orang Eropa dan keturunan aristokrat pribumi seperti ELS dan HBS yang mana pendidikannya menggunakan sistem pendidikan Belanda serta bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, sekolah yang sama juga disediakan untuk anak keturunan Timur Asing dan pribumi seperti HIS, HCS, MULO, dan AMS.

Pendidikan tidak dijadikan sebagai *main task* oleh pemerintahan Hindia-Belanda dalam penerapan Politik Etis. Namun tetap dilaksanakan dan pemberian fasilitas dan anggaran tetap disediakan. Selama awal penerapan politik etis di tahun 1900 hingga tahun 1928, sekolah dasar dengan bahasa pengantar Belanda terus mengalami peningkatan jumlah sekolah dari 191 sekolah menjadi 786 unit sekolah dasar.¹⁸ Perkembangan pendidikan yang terjadi di Hindia-Belanda tidak hanya terasa pada penambahan pengadaan fasilitas pendidikan berupa unit-unit sekolah saja, terdapat pula penambahan peserta didik yang mendapat kesempatan

¹⁶ Prayudi, Gusti Muhammad dan Dewi Salindri. 2015. *Ibid.* Hal:26.

¹⁷ Suratminto, Lilie. 2013. *Educational Policy in The Colonial Era.* Dalam HISTORIA : International Journal of History Education, Vol.XIV, No.1 (Juni 2013). Jakarta. Universitas Negeri Jakarta. Hal:79.

¹⁸ *Algemeene Verslag van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie, 1928 Tweede Deel*, Tabel 1,2, dalam Maria, Christiaan Lambert. 1968. *Colonial Education Policy and Practice in Indonesia 1900-1942.* Tesis tidak diterbitkan. Brisbane: PPs Australian National University. Hal:137.

untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang disediakan oleh pemerintahan Hindia-Belanda mengikuti pertambahan sekolah-sekolah yang tersebar. Akan tetapi, dibalik pesatnya perkembangan pendidikan dilihat dari data populasi sekolahnya, nyatanya pendidikan di Hindia-Belanda masih memetakan peserta didiknya sesuai dengan kelas sosialnya, aman jika hal ini disebut sebagai diskriminasi sosial yang terjadi di lingkup pendidikan, karena memang diskriminasi sosial sudah ada sebelum politik etis bahkan hingga masa awal penerapan politik etis.

Adanya pendidikan kolonial di bumi jajahan membuahkannya elit di Hindia-Belanda yang semula kelompok masyarakat dengan sebutan priyayi hanya berasal dari orang-orang kalangan yang berkedudukan di hirarki pegawai pemerintahan serta mempertahankan titel priyayi secara turun temurun, hal tersebut mengalami perubahan sehingga sebutan priyayi oleh masyarakat tidak lagi hanya didapatkan secara turun menurun melainkan melalui pendidikan, kemudian berlanjut pada status pekerjaan sebagai pegawai pemerintah. Bentuk perubahan tersebut merupakan suatu mobilitas sosial dimana terjadi dalam suatu masyarakat dikarenakan adanya suatu medium yang memberikan pintas perubahan status sosial seseorang di lingkungan masyarakat.

Perlu diketahui bahwasannya mobilitas sosial diartikan sebagai pergerakan individual maupun kelompok dalam sistem stratifikasi yang terdapat di masyarakat dari posisi satu ke posisi yang lain.¹⁹ Perubahan atau mobilitas sosial semacam ini masuk ke dalam kategori mobilitas sosial secara vertikal, dilatarbelakangi dengan sistem kelas terbuka ditandai adanya sekolah-sekolah yang dibuka untuk umum dimana hal tersebut akan membuka peluang terhadap lahirnya mobilitas sosial secara vertikal.²⁰ Di Hindia-Belanda juga mengalami hal serupa, dengan medium berupa pendidikan akan tetapi tidak hanya melalui gereja saja, melainkan sekolah-sekolah kolonial yang disediakan oleh pemerintah Hindia-Belanda.

Di tahun-tahun awal penerapan Probolinggo sebagai kota *Gemeente*, tidak banyak perubahan yang dialami, baik dari segi ekonomi dan infrastrukturnya. Barulah di pertengahan tahun 1928 dengan adanya perubahan yang dilakukan di segi infrastruktur sekolah yang mana beberapa sekolah tidak lagi dilanjutkan dan dihapuskan, kemudian didirikan sekolah lain dengan tingkatan berbeda guna memenuhi kebutuhan sumber daya tenaga kerja terdidik di tata pemerintahan kota. Penghapusan *kweekschool* dan OSVIA, dan pendirian sekolah tingkat lanjut (MULO)-lah yang dimaksudkan dari adanya perubahan infrastruktur sekolah tersebut. Di tahun-tahun berikutnya, pendidikan di *Gemeente* Probolinggo mulai berkembang, didukung dengan banyaknya peserta didik yang bersekolah dari tahun ke tahun, dan yang menjadi perhatian khusus ialah anak-anak pribumi

yang belajar di sekolah-sekolah yang disediakan oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Kesempatan mendapatkan pendidikan inilah yang dimanfaatkan oleh mayoritas masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya guna memberi peluang kepada anak-anaknya agar dapat bekerja di lingkup pemerintahan sebagai pegawai. Dari dasar inilah memunculkan dokma baru dalam masyarakat yang akhirnya melahirkan golongan priyayi baru yang bukan dari keturunan bangsawan saja akan tetapi berasal dari faktor pendidikan anak-anak mereka yang kemudian mendapat posisi sebagai pegawai administrasi pemerintahan walau hanya pada tingkat rendah, hal ini juga didukung dengan keinginan pemerintah Hindia-Belanda dalam menekan pengeluaran negara terhadap upah pegawai dengan merekrut tenaga kerja lulusan dari masyarakat pribumi yang dapat diberi gaji yang terbilang murah daripada merekrut tenaga kerja yang harus didatangkan dari Eropa yang gajinya terbilang sangat mahal.

Sistem pendidikan yang diterapkan di Hindia-Belanda khususnya di Probolinggo setelah penerapan Politik Etis memang telah memberikan celah-celah kepada masyarakat pribumi untuk dapat memasuki strata sosial yang lebih tinggi. Sekolah-sekolah yang awalnya hanya untuk anak-anak keturunan strata sosial tinggi, kemudian masyarakat strata sosial rendah mendapat kesempatan bersekolah di *Hollandsche Inlandsche School*, *Hollandsche Chinessesche School*, *Voll. 2e kl. School*, *Volkschool*, dan sekolah-sekolah sederajat di awal-awal penerapan Politik Etis, kemudian setelah mereka lulus dan mendapatkan pekerjaan dengan jabatan rendah hingga menengah ke atas di lingkungan pegawai pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan swasta dengan begitu dari jabatan pekerjaan mereka berpengaruh pada penghasilan bulanan mereka, dengan begitu anak-anak mereka juga akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan dan ini dapat dipastikan berdasarkan peraturan yang diberlakukan sebagai bentuk penerapan Politik Etis. Dan selama prosesnya dari tahun ke tahun, hal ini berangsur-angsur memberi celah kesempatan yang lebih besar dan semakin besar. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat reaksi berantai yang disebabkan oleh pengadaan pendidikan kolonial untuk masyarakat pribumi sehingga menimbulkan mobilitas sosial secara vertikal di lingkup masyarakat Probolinggo.

Penyediaan fasilitas pendidikan di Hindia-Belanda meningkat cukup signifikan setelah adanya penerapan politik etis di tahun 1900, hal yang sama terjadi di Probolinggo setelah kota ini mendapatkan otonomi sendiri di tahun 1918 serta mulai terasa perkembangannya di tahun-tahun berikutnya. Pernyataan ini didukung dengan peningkatan jumlah peserta didik yang mencapai puncaknya di tahun 1931, dibandingkan dengan populasi di tahun 1930,

¹⁹ Richard T. dan Robert P. 1992. *Sociology*. New Baskerville. York Graphic Service. Hal: 248., dalam Suardi, Fathur Rahman. *Mobilitas Sosial (Sosiologi)*. Hal:1., diunduh : 6 April 2020, pukul : 08.32 WIB ([www.academia.edu/29824642/Mobilitas Sosial Sosiologi](http://www.academia.edu/29824642/Mobilitas_Sosial_Sosiologi))

²⁰ _____, *Teori Tentang Mobilitas Sosial*. Hal: 2, diunduh : 6 April 2020, pukul : 08.00 WIB. (www.ppg.spada.ristekdikti.go.id)

populasi dari peserta didik di Probolinggo terhitung mengalami peningkatan hingga mencapai 16% atau sekitar 18.335 peserta didik diseluruh sekolah tingkat dasar baik pribumi maupun barat.²¹ Perkembangan pendidikan yang pesat ini menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang menjadi tujuan yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Jika pemerintah Hindia-Belanda dalam hal penyediaan fasilitas pendidikan di tanah jajahan bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja murah guna menekan angka pengeluaran dana pemerintahan, adapun fenomena mobilitas sosial yang muncul ke permukaan masyarakat di Probolinggo. Mobilitas sosial vertikal muncul dalam lingkup masyarakat sebagai hasil dari angka pendidikan yang meningkat. Menurut Turner, terdapat dua jenis mobilitas vertikal yakni mobilitas sponsor dan mobilitas konteks, dimana mobilitas konteks didefinisikan sebagai sistem dimana status elit menjadi hadiah atau imbalan yang didapatkan seseorang melalui usaha dalam persaingan terbuka, sedangkan mobilitas sponsor, penentuan status elit berdasarkan kriteria dan kualifikasi tertentu dan tidak dapat diganggu gugat oleh usaha apapun.²²

Anak-anak yang disekolahkan orangtuanya di sekolah-sekolah dengan sistem pendidikan kolonial diharapkan untuk menjadi lulusan-lulusan yang siap terjun dalam dunia kerja serta dilibatkan dalam jabatan-jabatan sipil dan administrasi pemerintah. Munculnya substansi pola pikir semacam ini dalam lingkup masyarakat pribumi dikarenakan masyarakat pribumi menganggap bahwa anak-anak yang mendapatkan pendidikan akan mendapatkan pekerjaan dan jabatan. Dengan memiliki jabatan dalam pekerjaan inilah mereka yang dihormati oleh kalangan masyarakat pribumi serta dianggap telah memiliki status sebagai seorang priyayi (baru). Tolak ukur masyarakat mengenai anggapan orang-orang yang bekerja dan memiliki jabatan dibawah pemerintahan telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan dimana seseorang yang bekerja dalam lingkungan kerajaan disebut sebagai priyayi. Tidak lagi status demikian hanya didapatkan berdasarkan keturunan seperti halnya pada masa kerajaan-kerajaan, melainkan telah berubah dengan adanya pendidikan. Dan pendidikan-lah yang menjadi tolak ukur baru yang digunakan oleh masyarakat.

Dari fenomena sosial yang demikian, dapat dikatakan bahwa perkembangan pendidikan di *Gemeente* Probolinggo telah mengantarkan perubahan pola pikir masyarakat dengan memunculkan status sosial baru yang disebutkan oleh Robert van Niel sebagai priyayi baru. Mobilitas sosial vertikal semacam ini masuk dalam kategori mobilitas sponsor dimana penentuan status elit (priyayi) berdasarkan kriteria dan kualifikasi tertentu (lulusan-lulusan yang terdidik) dan tidak dapat diganggu gugat oleh usaha apapun. Anak-anak yang mendapatkan dan menyelesaikan pendidikan masuk dalam

kriteria sebagai calon-calon tenaga kerja tingkat rendah dalam administrasi pemerintah Hindia-Belanda, dan bagi tenaga-tenaga kerja yang telah menjabat didalamnya tidak dapat dibatalkan oleh apapun dan pihak manapun sehingga kepastian jabatan inilah yang meyakinkan masyarakat bahwa dengan bekerja di lingkungan administrasi pemerintah merupakan pekerjaan elit dan dihormati.

Kompetensi anak-anak yang mendapat pendidikan dasar adalah agar dapat membaca dan berhitung. Dari pendidikan dasar, tidak menutup kemungkinan ada yang tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan lanjutan dan langsung terjun ke dunia kerja. Umumnya, anak-anak yang melanjutkan pendidikannya hingga ke tingkat pendidikan selanjutnya, lebih berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan tingkat pendidikan lanjutan yang telah ditempuhnya, seperti lulusan-lulusan dari sekolah guru yang selanjutnya dapat mengajar di sekolah-sekolah tipe 3 dan 4 dimana sekolah-sekolah tipe ini pengajarnya tidak hanya berasal dari keturunan Eropa saja melainkan dari keturunan pribumi juga. Adapun lulusan-lulusan sekolah teknik yang dapat bekerja di bidang yang berhubungan dengan teknik seperti pelabuhan dan pabrik. Begitu pula dengan lulusan-lulusan sekolah kedokteran yang menjadi dokter atau tenaga medis. Namun untuk di Probolinggo tidak terdapat sekolah kedokteran sehingga dokter-dokter yang berada di kota ini berasal dari luar kota seperti halnya Dokter Moh.Saleh, kelahiran Boyolali tahun 1888 dan merupakan salah satu dokter lulusan STOVIA yang menjadi dokter pribumi pertama, serta kediaman beliau menjadi rumah sakit pertama di Probolinggo; dan lulusan-lulusan sekolah menengah atau lanjutan setingkat MULO yang dapat berkarir di bidang lainnya seperti pegawai-pegawai pemerintah.

Dalam kepegawaian pemerintahan, selama kurun masa berkembangnya pendidikan-pendidikan untuk kalangan pribumi, semakin banyak pula kaum pribumi yang telah mendapatkan pendidikan masuk kedalam birokrasi pemerintahan di *Gemeente* Probolinggo. Kalangan ini memiliki jabatan-jabatan dalam struktur pemerintahan dan dapat disebut sebagai *functional group*, yakni golongan yang berfungsi sebagai pegawai negeri dalam kedinasan-kedinasan.²³ Untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan maupun dalam mengajukan kenaikan jabatan pegawai tidak dilakukan secara sembarangan begitu saja, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti, harus merupakan lulusan MULO atau sederajat, menguasai dasar-dasar bahasa Belanda dan memahaminya, cakap, rajin, taat peraturan, dan fleksibel. Salah satu pegawai pemerintahan *Gemeente* Probolinggo yang memiliki catatan kerja secara tertulis ialah M. Soeparto, seorang juru tulis pemerintahan *Stadsgemeente* Probolinggo dibawah pimpinan

²¹ *Algemeene Verslag van het Onderwijs in Nederlands Indie Over het Schooljaar 1931/1932 Tweede Deel : Statistische Gegevens* Hal: 32-33. Koleksi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur

²² _____, *Teori Tentang Mobilitas Sosial., Op.Cit.,* Hal: 2

²³ Ismarini, Ani. 2014. "Kedudukan Elit Pribumi dalam Pemerintahan di Jawa Barat (1925-1942)". Dalam PATANJALA, Vol. 6, No.2 (Juni 2014) 179-192. Sumedang: Universitas Padjadjaran. Hal:190.

Burgemeester L. Noe dimana Soeparto telah berdinasi selama 4 tahun dengan jabatan sebagai *Klerk*. Di dalam surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Urusan Kepegawaian yang bertempat di Surabaya menghaturkan permohonan untuk memberikan kenaikan gaji dan perubahan jabatan kepada pegawai atas nama M. Soeparto yang mana setelah masa jabatan sebelumnya telah mencapai tahun ke-4 boleh diberikan gaji menurut *schaal* dari *Klerk klas 1 (Schaal baru)* dengan tetap memenuhi persyaratan pengangkatan maupun yang berhubungan dengan kompetensinya. Selain itu, terdapat pula lampiran yang menjelaskan bahwa setelah ditetapkan pengangkatan jabatan yang dimaksudkan, diberikan masa kerja selama 13 bulan atau 1 tahun 1 bulan sebelum dapat mengajukan pengangkatan kembali. Dari surat permohonan tersebut, gaji yang diterima oleh pegawai juru tulis dengan jabatan *Klerk* biasa adalah 27,50 gulden dan untuk gaji *Klerk klas 1* sebesar 30 gulden.²⁴

Dibalik berkembangnya pendidikan untuk pribumi, maka terdapat konsekuensi yang diperoleh pemerintahan Hindia-Belanda sebagai *feedback* dari setiap kebijakan yang diberlakukannya, termasuk balasan berupa kritik dari tokoh-tokoh pribumi terdidik yang mulai sadar atas apa yang telah dialami oleh masyarakat pribumi pada umumnya sebagai akibat dari penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah yang diskriminatif terhadap masyarakat non-Eropa. Munculnya kritik-kritik, teguran, dan penentangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh terdidik dari kaum pribumi menjadi titik awal adanya pergerakan-pergerakan yang mulai menjamur di Hindia-Belanda, tak terkecuali di *Gemeente* Probolinggo. Pergerakan-pergerakan nasionalis seperti, Sarekat Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Arab Indonesia, *Jong Islamieten Bond*, Pergerakan Bangsa Indonesia (1931), dan Suluh Pemuda Indonesia (1933).

KESIMPULAN

Pendirian fasilitas pendidikan di Hindia-Belanda sebagai bentuk dari penerapan Politik Etis nyatanya memiliki tujuan yang bercabang dengan berdasar pada sudut pandangnya. Jika ditilik dari sudut pandang pemerintahan Hindia-Belanda, penerapan pemberian fasilitas pendidikan bagi masyarakat pribumi bertujuan untuk mendapatkan tenaga-tenaga kerja dengan upah yang murah guna menstabilkan ekonomi di Hindia-Belanda yang mengalami kemerosotan akibat terdampak pada krisis ekonomi Eropa yang pada saat itu mengalami *downfall* agar tidak mengganggu ekonomi negara induk, Belanda. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat khususnya pribumi, pendidikan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat pribumi dalam menjalankan politik, ekonomi, dan sosial mereka sendiri melalui keikutsertaan mereka yang

terpelajar dalam sistem administrasi pemerintahan.

Gemeente Probolinggo yang baru saja terbentuk di tahun 1918 mengalami puncak perkembangannya, mulai dari infrastruktur kota, ekonomi penduduk, dan pendidikan penduduknya. Terdapat berbagai sekolah yang menyediakan pendidikan kolonial bagi peserta didiknya, sekolah-sekolah yang terdapat di Probolinggo seperti ELS (*Eurospeesche Lagere School*), HIS (*Hollandsche Inlandsche School*), HCS (*Hollandsche Chineesche School*), *Volksschool* (Sekolah Desa) dan *Schakelschool* (Sekolah Rakyat), MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*), Sekolah Ongko Loro, dan *Vervolgschool* (Sekolah Lanjutan). Adanya perkembangan penyediaan fasilitas di bidang pendidikan inilah yang melatari terbentuknya masyarakat elit baru di *Gemeente* Probolinggo serta dengan didukung keinginan penduduk Probolinggo untuk menyekolahkan anak-anaknya agar menjadi lulusan terdidik dan mendapatkan pekerjaan maupun jabatan sipil dalam pemerintahan, serta pemerintahan Hindia-Belanda yang saat itu melakukan penghematan pengeluaran anggaran dengan merekrut orang-orang pribumi yang terpelajar untuk bekerja dilingkungan administrasi pemerintahan.

Terbentuknya peningkatan pesat dalam perkembangan dunia pendidikan di masa kolonial telah membuka kemungkinan adanya mobilitas sosial dalam masyarakat. Di lingkup masyarakat Probolinggo selama periodenya bergelar sebagai *Gemeente* telah melahirkan mobilitas sosial vertikal dengan kategori mobilitas sosial sponsor dimana penentuan status elit atau yang disebut priyayi berdasarkan kriteria dan kualifikasi tertentu yakni lulusan-lulusan yang terdidik dan tidak dapat diganggu gugat oleh usaha apapun dengan adanya status dan jabatan yang dimiliki seseorang yang bekerja dilingkungan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang awalnya hanya diperuntukkan kepada anak-anak dari kalangan strata sosial atas seperti golongan orang-orang Eropa serta golongan piyayi atau bangsawan pribumi, akhirnya dapat pula dimasuki oleh anak-anak dari masyarakat strata sosial menengah ke bawah setelah diterapkannya kebijakan Politik Etis yang ditandai dengan perkembangan penyediaan fasilitas-fasilitas pendidikan berupa sekolah rakyat, sekolah desa, dan sekolah lanjutan. Dengan pengadaan sekolah-sekolah yang dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat yang lain dan tidak hanya untuk masyarakat kalangan strata atas saja, hal ini melahirkan perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat yang disebut dengan Mobilitas Sosial secara vertikal dan dalam kasus ini mobilitas yang terjadi masuk dalam kategori Mobilitas Sosial Sponsor. Pelajar-pelajar yang menjadi lulusan dari sekolah-sekolah tersebut mendapatkan pekerjaan dan jabatan yang sesuai dengan tingkat pendidikan terakhir yang telah ditempuh, mereka inilah yang kemudian disebut sebagai priyayi baru. Dan

²⁴ Surat Permohonan beserta Lampiran Ketetapan No.108/F dan Salinan Surat Ketetapan No.62/F. Probolinggo, 29 Mei 1941. Dalam *Stadsgemeente* Probolinggo Kepada Kanjeng Toean Goepernoer Djawa Timoer Bagian Oeroesan Pegawai Di Soerabaja Tentang Inpassing Pegawai

Probolinggo, 4 Agustus 1941 (*Burgerlijke Openbare Werken van Province Oost-Java Book 2*), Koleksi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Timur.

selama periode ini pula acuan terhadap sebutan priyayi mengalami perubahan dari mereka yang disebut sebagai priyayi dengan hanya berdasarkan garis keturunan, kemudian berubah menjadi mereka yang menjadi lulusan-lulusan terdidik, bekerja dan menjabat di lingkup pemerintahan maupun bekerja dan memiliki jabatan di perusahaan-perusahaan swasta.

Melalui pendidikan pula yang menjadikan nilai tambah dalam meningkatnya pergerakan nasionalis yang dilakukan oleh pemuda-pemuda terpelajar sebagai permulaan terbukanya kesadaran politik dan memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan terbentuknya kelompok masyarakat baru seperti masyarakat *Pandalungan* serta terbentuknya masyarakat elit baru sebagai hasil dari berkembangnya pendidikan di Probolinggo ini telah menghasilkan gerakan-gerakan nasionalis dengan ditandai banyaknya kemunculan organisasi-organisasi yang anggotanya terdiri dari pemuda-pemuda terpelajar, pegawai-pegawai administrasi, tokoh-tokoh agama hingga pemuda-pemuda dari kalangan rakyat biasa. Semua kelompok masyarakat ini membentuk organisasinya masing-masing dengan tujuan yang sama namun memiliki cara yang berbeda dalam melakukan pergerakan organisasinya seperti, Sarekat Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Arab Indonesia, *Jong Islamieten Bond*, Pergerakan Bangsa Indonesia (1931), dan Suluh Pemuda Indonesia (1933).

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip & Dokumen

- Algemeene verslag van het onderwijs in Nederlands Indie over het schooljaar 1929/1930. Tweede Deel : Statistische Gegevens.*
- Algemeene verslag van het onderwijs in Nederlands Indie over het schooljaar 1931/1932. Tweede Deel : Statistische Gegevens.*
- Algemeene verslag van het onderwijs in Nederlands Indie over het schooljaar 1938/1939. Tweede Deel : Statistische Gegevens.*
- Stadsgemeente Probolinggo Kepada Kanjeng Toean Goepernoer Djawa Timoer Bagian Oeroesan Pegawai Di Soerabaja Tentang *Inpassing* Pegawai Probolinggo, 4 Agustus 1941. (*Burgerlijke Openbare Werken van Province Oost-Java Book 2*).

B. BUKU

- Kasdi, Aminudin. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.
- Pemkot Probolinggo. 1968. *Setengah Abad Usia Kotamadya Probolinggo*.
- Pemkot Probolinggo. 2010. *Sejarah Kota Probolinggo dari Waktu ke Waktu*. Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo.
- Santoso, Slamet Iman. 1987. *Pendidikan di Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta : Haji Masagung.
- S, Nasution. 1994. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Edisi Ke-

2Cetakan 1. Jakarta : Bumi Aksara.

van Niel, Robert. 1984. *Munculnya Elit Modern Indonesia : Terjemahan Yayasan Ilmu Sosial, Jakarta*. Jakarta. Dunia Pustaka Jaya

_____. 1957. *Kenang-kenangan Kotapraja Probolinggo*. DPRD Peralihan Probolinggo.

C. Jurnal Ilmiah, Skripsi, dan Tesis

- Astutik, Ruli Muji. 2013. Gemeente Probolinggo 1918-1926. Dalam AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 1, No.3 (Hal. 520-531). Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Ismarini, Ani. 2014. Kedudukan Elit Pribumi dalam Pemerintahan di Jawa Barat (1925-1942). Dalam PATANJALA, Vol. 6, No.2 (Juni 2014) 179-192. Sumedang: Universitas Padjadjaran.
- Maria, Christiaan Lambert. 1968. *Colonial Education Policy and Practice in Indonesia 1900-1042*. Tesis tidak diterbitkan. Brisbane: PPs Australian National University.
- Prayudi, Gusti Muhammad dan Dewi Salindri. 2015. Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Surabaya Tahun 1901-1942. Dalam *Publika Budaya* Volume 1, No.3 Maret 2015 (Hal. 20-34). Jember: Universitas Jember.
- Suratminto, Lilie. 2013. *Educational Policy in The Colonial Era*. Dalam HISTORIA: International Journal of History Education, Vol.XIV, No.1 (Juni 2013). Jakarta. Universitas Negeri Jakarta.

D. Artikel

- Supardan, Dadang. 2008. *Menyingkap Perkembangan Pendidikan Sejak Masa Kolonial Hingga Sekarang: Perspektif Pendidikan Kritis*. Dalam *Generasi Kampus*, Volume 1, Nomor 2, September 2008. Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.

E. Internet

- Richard T. dan Robert P. 1992. *Sociology*. New Baskerville. York Graphic Service. Hal: 248., dalam Suardi, Fathur Rahman. *Mobilitas Sosial (Sosiologi)*. diunduh : 6 April 2020, pukul : 08.32 WIB ([www.academia.edu/29824642/Mobilitas Sosial Sosiologi](http://www.academia.edu/29824642/Mobilitas_Sosial_Sosiologi))
- Wahyuni, Nani. *Definisi Perkembangan*. 25 Oktober 2010 11:42, diakses pada tanggal: 12 Januari 2021, pukul: 11.15 WIB. (www.kompasiana.com).
- _____. *Teori Tentang Mobilitas Sosial*. diunduh: 6 April 2020, pukul: 08.00 WIB. (www.ppg.pada.ristekdikti.go.id)